Meningkatnya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	
Indikator	Indek Reformasi Birokrasi (Permenpan RB no. 4 tahun 2014 hal 54, permenpan RB no.26 tahun 2020 lampiran bab II hal 40)
Fenomena / Penyebab	rendahnya indeks reformasi birokrasi kab. Lumajang (56,66) Predikat CC peringkat 36 dari 38 Kabupaten /Kota jawa timur

Kinerja pelayanan yang baik akan memberikan kontribusi pada pencapaian kepuasan pelanggan yang memegang peranan penting bagi eksistensi organisasi pelayanan publik (Eet safulk Hidayat, Jurnal ilmiah ilmu administrasi negara Vol 6 No. 2 Tahun 2019)

MAKA

"meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah;" (Permenpan RB 26/2020 Hal. 33)

JIKA

meningkatnya kepuasan masyarakat	
Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan kec. Klakah 9Permenpan RB no.14 tahun 2017 Bab V hal. 19-21)
Fenomena / Penyebab	rendahnya tingkat kepuasan /kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Dok. SKM kec. Klakah tahun 2020) pada tahun 2020 sebesar 82,34 drai target 85,5

Pengaruh Akuntabilitas keuangan dan akuintabilitas kinerja terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakt atas penggunaan Dana Desa (Eni D, Enita B. , Journal Bisnis dan ekonomi Vol 11 no 01 juni 2020)

MAKA

pemerintahan desa yang baik meningkatkan tingakt kepercayaan dan kepuasan masyarakat

JIKA

faktor faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat adalah koordinasi dan pendekatan yang baik kepada masyarakat sebagai Perangkat daerah penyelenggaran layanan publik (Journal Habitus Jurnal poendidikan sosiologi dan antropologi vol. 1 no 1 tahun 2017 Hal &)

meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	
Indikator	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu (Permendagri 114 tahun 2014 Ps 4 29)
Fenomena / Penyebab	belum optimalnya laporan penyelenggaran pemerintahan desa (LKJ Kec. Klakah tahun 2021 Hal. 26 nkinerja desa rendah dalam tertib administrasi yaitu dari 12 desa 2 desa belum bisa tertib adminstrasi atau sebesar 83,33%)

tugas camat membatu bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaran pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyrakat desa di wilayah kecamatan (Perbup Lumajang no 96 th 2019 psl.6)

Mengoptimalkan fasiltasi dan koordinasi kecamatan	
Indikator	Persentase Koordinasi dan fasilitasi pemerintahan tingkat kecamatan (PP no. 17 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah psl. 10)
Fenomena / Penyebab	rendahnya koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan menyebabkan Penyelenggaraan pembangunan kurang partisipatif/ kurang mendukung semua sektor pembangunan (td.2 Musrenbang RKPD kec. klakah tahun 2022 sektor ekonomi dan sosbud kososng/ tidak ada usulan warga)